



**Revisi**  
**Perjanjian Kinerja Tahunan**  
**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**  
**Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Triwulan I dan II tahun 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan revisi target dan strategi pada Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 melalui mekanisme sebagai berikut:

Pelaksanaan proses ini memerlukan waktu 1 bulan sehingga penandatanganan dilakukan pada bulan Oktober 2023.

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan target capaian kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang mendapatkan alokasi program nasional layanan hukum atas perubahan target dan capaian kinerja	24 Juli 2023	Rekomendasi Perubahan Target pada Indikator Layanan Hukum
2	Telah dilaksanakan Terateral Meeting antara BAPPENAS, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sehubungan dengan adanya revisi target kinerja	16 Oktober 2023	Persetujuan Perubahan Target pada Indikator Layanan Hukum
3	Dilakukan penetapan target tahun 2023 yang telah direvisi	16 Oktober 2023	Reviu PKT 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku  
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung  
Selaku Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Selaku Pihak Kedua

SUGIYANTO, S.H., M.H.

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Selaku Pihak Pertama

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku  
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung  
Selaku Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Selaku Pihak Kedua

SUGIYANTO, S.H., M.H.

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Selaku Pihak Pertama

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (jumlah)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	3 Naskah
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	100 Orang
		c. Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.985 Orang
		d. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	3.776 Perkara
		e. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	190 Perkara
		f. Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	130.943 Perkara
		g. Persentase Perkara Yang diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (jumlah)</b>
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun	1 Naskah
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis	380 Orang
		c. Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi	1.419 Orang
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	N/A
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	N/A
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	4 Dokumen
		b. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		c. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan



No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	7.414.036.000,00
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Rp.	0
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Rp.	0
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Rp.	77.518.708.000,00
5.	Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Rp.	49.649.209.000,00

Jakarta, 16 Oktober 2023

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Arry Soelaksono, S.E, S.H., M.Hum  
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Selaku Pihak Kedua

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Umum  
Selaku Pihak Pertama

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

KURNIA ARRY SOELAKSONO, S.E., S.H., M.Hum.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	4 Dokumen
		b. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		c. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>		<b>Revisi Anggaran</b>
1.	Layanan Perencanaan dan Anggaran	Rp.	1.555.206.000,00	
2.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Rp.	1.333.024.000,00	
3.	Pengelolaan Keuangan	Rp.	813.246.000,00	
4.	Pelayanan Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	Rp.	207.304.000,00	

Jakarta, 16 Oktober 2023

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M. Hum

### **Pelaksanaan Kegiatan Pada Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan
1	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan</li><li>2 Penyusunan Dokumen Kepegawaian</li><li>3 Penyusunan Dokumen Organisasi dan Tatalaksana</li><li>4 Penyusunan Dokumen Umum</li></ol>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Selaku Pihak Kedua

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Plt. Direktur Pembinaan  
Tenaga Teknis Peradilan Umum  
Selaku Pihak Pertama

ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.


**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun	1 Naskah
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis	380 Orang
		c. Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi Dan Mutasi	1.419 Orang
2.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Revisi Anggaran</b>
1.	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 7.414.036.000,00	

Jakarta, 16 Oktober 2023

Plt. Direktur Pembinaan  
Tenaga Teknis Peradilan Umum



ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.

### **Pelaksanaan Kegiatan Pada Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan
1	Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tenaga Teknis
2	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis	1 Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (300 Orang) 2 Bimbingan Teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (80 Orang)
3	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Monev Perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Selaku Pihak Kedua

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Direktur Pembinaan  
Administrasi Peradilan Umum  
Selaku Pihak Pertama

ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Kebijaksanaan Yang Disusun	3 Dokumen
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	100 Orang
		c. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.985 Orang
		d. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar Gedung Pengadilan	3.776 Perkara
		e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	190 Perkara
		f. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	130.943 Perkara

No.	Kegiatan	Anggaran		Revisi Anggaran
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pengadilan	Rp.	70.040.000,00	
2.	Rapat Koordinasi SIPP	Rp.	265.936.000,00	
3.	Sosialisasi dan Bimtek SPPT TI di Pengadilan	Rp.	263.932.000,00	
4.	Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum bagi Penyandang Difabel	Rp.	130.952.000,00	
5.	Pembentukan / Peresmian / Peningkatan Klas Pengadilan	Rp.	58.440.000,00	
6.	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	Rp.	11.136.800.000,00	100.166.000,00
7.	Pelaksanaan Zitting Platz/Sidang di Luar Pengadilan	Rp.	5.817.295.000,00	5.620.978.000,00
8.	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo	Rp.	106.350.000,00	100.166.000,00
9.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	Rp.	54.856.876.000,00	

Jakarta, 16 Oktober 2023

Direktur Pembinaan  
Administrasi Peradilan Umum

ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.